

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERAH DAN  
*E-GOVERNMENT* TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh:**

**SUSAN AZIS  
NIM. 18.52.21.051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERA DAN  
E-GOVERNMENT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA**

SKRIPSI

Diajukan kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh :

SUSAN AZIS  
NIM. 18.52.2.1.051

Surakarta, 26 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUSAN AZIS  
NIM : 18.52.21.051  
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Agustus 2022



Susan Azis

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUSAN AZIS  
NIM : 18.52.21.051  
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERAH DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari <http://www.otda.kemedagri.go.id/>, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan <https://www.menpan.go.id/site/>. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi saya menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 26 Agustus 2022



Susan Azis

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Susan Azis

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Susan Azis NIM: 18.52.2.1051 yang berjudul:

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERAH DAN  
E-GOVERNMENT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Agustus 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, BELANJA DAERAH DAN  
E-GOVERNMENT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA**

Oleh:

**SUSAN AZIS**  
**NIM. 18.52.21.051**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022/07 Rabiul Awal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

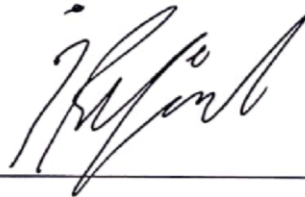
Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Ade Setiawan, M.Ak, CRA, CRP, CIAP  
NIP. 19800712 201403 1 003



Penguji II  
Frank Aligarh, S.Pd., M.Sc  
NIP. 19920912 201903 1 011



Penguji III  
Mohamad Irsyad, Lc., M.E  
NIP. 19900603 201903 1 005



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



**M. Rahmawan Arifin, M.Si**  
NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

“Jangan pernah lupa untuk mengucapkan terimakasih dan maaf pada dirimu sendiri dan ingat bahwa kamu tidak sendiri, karena Allah selalu bersamamu”

(Susan Azis)

“Anda perlu waktu untuk berpikir, waktu untuk bermimpi, waktu untuk berbicara dan waktu untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali” (Brooke McAlary)

“Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya”

(Muhammad Ali)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (Qs. Al-Baqarah : 286)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga” (HR Bukhari dan Muslim)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobil'alamin*

Kalimat syukur yang tiada henti kuucapkan atas curahan rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah menandai selesainya penulisan karya ilmiah skripsi ini.

Dengan segenap hati dan doa

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakakku tersayang,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terimakasih ♥



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan curahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK, Belanja Daerah dan *E-Government* Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Fitri Laela Wijayati, S.E, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu kepada penulis, bimbingan, saran, serta perhatiannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Suwarji dan Ibu Sri Sunarmi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan pengorbanan yang tidak akan pernah terlupakan.
7. Kakakku tersayang Muhammad Rochman Aji yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa, nasihat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, nasihat, doa dan semangat yang sangat berkesan dan berarti bagi penulis.
9. Teman-teman angkatan tahun 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta batuan selama menyelesaikan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Agustus 2022

Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence the effect of the results of the BPK examination, regional spending and e-government on the performance of local government administration in Java Island.*

*The data used in this study are secondary data obtained from score on the Regional Government Implementation Performance Evaluation (EKPPD), the Inspection Result Report (LHP), the Budget Realization Report (LRA) and the results of the Electronic-Based Government System Evaluation (SPBE). The population of this research is all district/city governments on Java Island in 2018. The sample of this research was taken using the purposive sampling method, with a sample of 106 districts/cities in Java. The research data analysis method uses multiple linear regression analysis with the Eviews 12.*

*The results of analysis indicate that the audit opinion has a positive effect on the performance of local government administration and audit findings have a negative effect on the performance of local government administration. Follow-up audit results, regional spending and e-government have no effect on the performance of local government administration.*

**Keywords:** *performance of local government administration, audit opinion, audit findings, follow-up on audit results, regional spending and e-government*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh hasil pemeriksaan BPK, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel sebanyak 106 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Metode analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat *Eviews 12*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government* tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9

1.4.	Rumusan Masalah .....	10
1.5.	Tujuan Penelitian.....	10
1.6.	Manfaat Penelitian .....	11
1.7.	Jadwal Penelitian.....	12
1.8.	Sistematika Penulisan .....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....		14
2.1.	Kajian Teori.....	14
2.1.1.	Teori Stewardship ( <i>Stewardship theory</i> ).....	14
2.1.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	15
2.1.3.	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....	16
1.	Opini Audit .....	17
2.	Temuan Audit.....	18
3.	Tindak Lanjut Hasil Audit.....	19
2.1.4.	Belanja Daerah.....	19
2.1.5.	<i>E-Government</i> .....	20
2.2.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	22
2.3.	Kerangka Berfikir.....	27
2.4.	Hipotesis .....	27
2.4.1.	Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	27

2.4.2.	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah .....	28
2.3.3.	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	29
2.3.4.	Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	30
2.3.5.	Pengaruh <i>E-Government</i> Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1.	Waktu dan Wilayah Penelitian .....	32
3.2.	Jenis Penelitian .....	32
3.3.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	32
3.3.1.	Populasi .....	32
3.3.2.	Sampel.....	33
3.3.3.	Teknik Pengambilan Sampel .....	33
3.4.	Data dan Sumber Data .....	34
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6.	Variabel Penelitian .....	35
3.6.1.	Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ).....	35
3.6.2.	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	35

3.7.	Definisi Operasional Variabel .....	35
3.8.	Teknik analisis Data .....	37
3.8.1.	Uji Asumsi Klasik .....	38
1.	Uji Normalitas .....	38
2.	Uji Multikolinearitas .....	38
3.	Uji Heterokedastisitas .....	39
4.	Uji Autokorelasi .....	39
3.8.2.	Uji Ketepatan Model .....	40
1.	Uji F .....	40
2.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	40
3.8.3.	Uji Regresi Linier Berganda .....	40
3.8.4.	Uji Hipotesis .....	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....		42
4.1.	Gambaran Umum Penelitian .....	42
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	46
4.2.1.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	46
4.2.2.	Hasil Uji Ketepatan Model .....	50
4.2.3.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier berganda .....	51
4.2.4.	Hasil Uji Hipotesis .....	53
4.3.	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	56



4.3.1.	Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	56
4.3.2.	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	57
4.3.3.	Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	59
4.3.4.	Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	60
4.3.5.	Pengaruh <i>E-Government</i> Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	61
BAB V PENUTUP .....		63
5.1.	Kesimpulan .....	63
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		66
LAMPIRAN .....		70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	16
Tabel 2.2 Predikat Penilaian SPBE .....	22
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel .....	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	36
Tabel 3.3 Tabel Keputusan <i>Durbin-Waston</i> .....	39
Tabel 4.1 Data Nama Pemerintah Kabupaten/Kota Sampel.....	42
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.6 Hasil Perbaikan Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji F .....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	52
Tabel 4.10 Hasil Uji t .....	54
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Penelitian .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Anggaran belanja Terbesar Tahun 2018 .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian.....	71
Lampiran 2 Sampel Penelitian.....	73
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	75
Lampiran 4 Contoh EKPPD Tingkat Provinsi Tahun 2018 .....	80
Lampiran 5 Hasil Uji Analisi Statistik Deskriptif.....	81
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	81
Lampiran 7 Hasil Uji Ketepatan Model.....	83
Lampiran 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	84
Lampiran 9 Hasil Uji t .....	84
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiarisme .....	85
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.....	86

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bentuk pemerintahan Indonesia meliputi pusat, provinsi, kabupaten dan kota memberikan konsekuensi pada penyelenggaraan pemerintahan, termasuk desentralisasi dan pemberian wewenang. Sehingga setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dan kepentingan rakyatnya, dengan tujuan pemerintah daerah dapat mandiri dan mengembangkan potensi daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan capaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik berupa masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat/dampak. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah pusat melakukan pengendalian atas kinerja pemerintah daerah melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2018 terdapat tiga Provinsi dengan skor tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sepuluh kabupaten dengan skor tertinggi, yaitu Banyuwangi, Karanganyar, Pati, Bone, Bulukumba, Pohuwato, Sukabumi, Sleman, Dharmasraya dan Garut. Serta 10 kota dengan skor

tertinggi, yaitu Tangerang, Samarinda, Cimahi, Gorontalo, Yogyakarta, Banjar, Pekanbaru, Jambi, Denpasar dan Semarang. Hal ini memberikan gambaran tingginya skor kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa yang menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa baik.

Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia, lebih dari setengah penduduk di Indonesia tinggal. Kegiatan ekonomi pada Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Keunggulan Pulau ini kaya akan sumber daya alam, angkatan kerja berpendidikan, pertumbuhan pasar domestik yang cepat, dan infrastruktur yang lengkap (Fatmawati & Kiswanto, 2019). Sehingga keunggulan yang dimiliki Pulau Jawa dapat menaikkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen (Kaho, 2002). Faktor organisasi dan manajemen menjadi salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Faktor ini mencakup kebijakan keuangan seperti melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung program/kegiatan pemerintahan.

Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah wajib menyusun dan mengirim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan berupa opini audit, temuan audit dan kesimpulan dalam bentuk rekomendasi yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kualitas LKPD tahun 2018 meningkat dengan memperoleh opini WTP sebesar 82% dibandingkan tahun 2015 sebesar 58% (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2019). Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah khususnya Pulau Jawa tahun 2018 sebanyak 94% dan opini WDP sebesar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki kualitas laporan keuangan yang baik.

Kemudian jumlah temuan yang diungkapkan BPK tahun 2018 sebanyak 12.117 temuan yang memuat 5.858 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2019). Serta jumlah temuan audit pada pemerintah daerah di Pulau Jawa sebanyak 2.463 temuan dan menunjukkan jumlah temuan pemerintah daerah di Pulau Jawa cukup tinggi.

BPK memberikan rekomendasi 545.995 sebesar Rp305,66 triliun dan sebanyak 74,6% rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2019). Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan BPK tahun 2018, rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah khususnya Pulau Jawa cukup tinggi di atas 50%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa berusaha meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK.

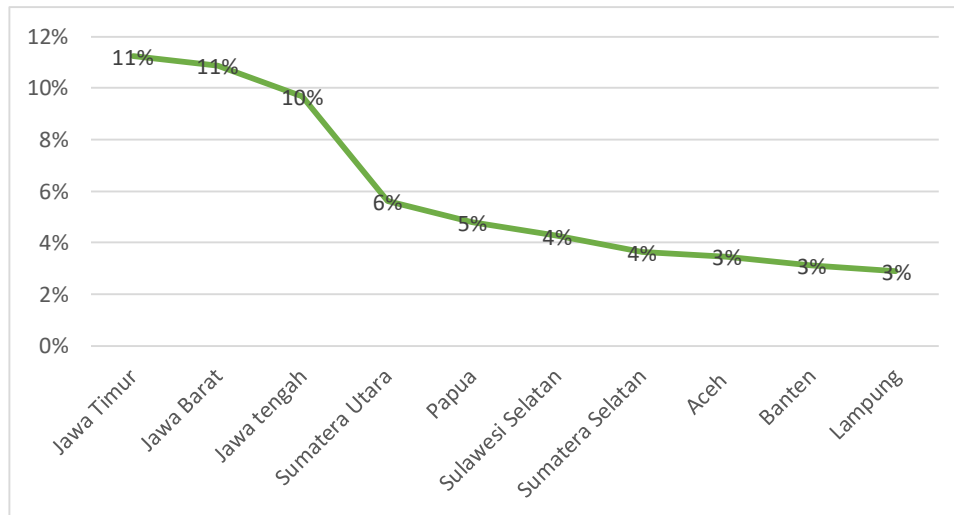
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa yang baik dengan memperoleh opini WTP sebesar 94%, kemudian rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah di Pulau Jawa yang tinggi di atas 50%. Namun jumlah temuan audit pemerintah daerah khususnya Pulau Jawa tahun 2018 cukup tinggi sebanyak 2.463 temuan.

Salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yaitu faktor keuangan. Sumber keuangan pemerintah daerah berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tiga sumber keuangan tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melakukan peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan publik, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja yang besar salah satunya pada belanja modal.

Berdasarkan APBD pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia menurut provinsi tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), dijelaskan bahwa total belanja daerah sebesar 806 miliar. Pemerintah daerah dengan anggaran belanja terbesar diduduki oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh, Banten dan Lampung.



Gambar 1.1  
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2018



Sumber : Data Diolah Penulis, (2022)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 pemerintah daerah di Pulau Jawa yang masuk dalam pemerintah daerah dengan anggaran belanja terbesar tahun 2018. Anggaran belanja yang besar dapat meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya, yaitu faktor peralatan. *E-Government* menjadi alat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 pemerintah harus segera mentransformasikan menuju *e-government* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah pusat melakukan pengendalian penggunaan *e-government* pemerintah daerah, dengan melakukan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018, indeks SPBE Nasional mencapai 1,98 dari skala 5 dengan predikat kurang. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE rendah (Humas Menpanrb, 2021). Evaluasi SPBE tahun 2018, menunjukkan 10 provinsi dengan indeks SPBE tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki kualitas *e-government* yang baik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung program atau kegiatan pemerintahan dan mengalokasikan anggaran belanja daerah salah satunya pada belanja modal untuk meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Serta pemerintah daerah menerapkan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tingginya skor kinerja pemerintahan, kualitas laporan keuangan yang baik, rekomendasi yang sudah ditidaklanjuti, anggaran belanja yang besar dan kualitas *e-government* yang baik tidak menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa baik, karena jumlah temuan audit yang cukup tinggi pada pemerintah daerah di Pulau Jawa sehingga diperlukannya evaluasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, terdapat inkonsistensi hasil penelitian pengaruh variabel opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Sutopo et al., (2017), Andani et al., (2019) dan Suharyono, (2020) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Kusuma & Kurniasih, (2017), Hakim & Nurhenti, (2020) dan Ditasari & Sudrajat, (2020) yang menemukan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil penelitian juga terdapat pada variabel temuan audit. Berdasarkan penelitian Afrian, (2016) dan Ditasari & Sudrajat, (2020) membuktikan temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Qowi & Prabowo, (2017), Fatmawati & Kiswanto, (2019) dan Hakim & Nurhenti, (2020) menemukan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Dasmal et al., (2020) menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian pada variabel tindak lanjut hasil audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih sedikit dilakukan sehingga belum ada inkonsistensi hasil penelitian. Berdasarkan penelitian Fatmawati & Kiswanto, (2019) membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian dengan variabel belanja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan Aladin et al., (2021) dan Usman et al., (2019) membuktikan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Putri & Sari, (2020), Andani et al., (2019), Utama et al., (2019), Pauli & Handayani, (2019) dan Qowi & Prabowo, (2017) yang menyatakan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Dasmal et al., (2020) dan Kusuma & Kurniasih, (2017) menemukan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dengan variabel *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih jarang dilakukan penelitian. Penelitian dengan variabel *e-government* yang dilakukan Sutopo et al., (2017) dan Suharyono, (2020) membuktikan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu membuat penelitian tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan penelitian yang menggunakan variabel tindak lanjut hasil audit dan *e-government* yang masih jarang digunakan dipenelitian sebelumnya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sutopo et al., (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel temuan audit, tindak lanjut hasil audit dan belanja daerah, serta indikator pengukuran *e-government* menggunakan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu objek penelitian dilakukan pada pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul :  
**“Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK, Belanja Daerah dan *E-Government* Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tingginya skor kinerja pemerintahan, kualitas laporan keuangan yang baik, rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, anggaran belanja daerah yang besar dan kualitas *e-government* yang baik. Namun jumlah temuan audit pemerintah daerah di Pulau Jawa cukup tinggi.
2. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

### **1.3. Batasan Masalah**

Melihat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian tetap fokus, penelitian ini dibatasi pada :

1. Hasil pemeriksaan BPK yang meliputi opini audit, temuan audit terkait kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, tindak lanjut hasil audit berupa rekomendasi BPK, belanja daerah berupa belanja modal dan *e-government*.
2. Pembatasan pada objek penelitian dengan melakukan penelitian pada seluruh pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan tahun 2018.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa ?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa ?
3. Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa ?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa ?
5. Apakah *e-government* berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa ?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
2. Menganalisis pengaruh temuan audit terkait kepatuhan atas peraturan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerinah daerah di Pulau jawa.
3. Menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil audit berupa rekomendasi BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah di Pulau Jawa.

4. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
5. Menganalisis pengaruh *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam bidang akademis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang pengaruh hasil pemeriksaan BPK, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mampu menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada peneliti mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

##### **b. Manfaat Bagi BPK dan BPKP**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi BPK dan BPKP untuk lebih meningkatkan kualitas audit, pengendalian internal dan kepatuhan atas perundang-undangan serta mendorong dilaksanakannya tindak lanjut hasil audit berupa rekomendasi.

c. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

d. Manfaat Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah pusat meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.

e. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan menambah pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik tentang pengaruh hasil audit BPK, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **1.7. Jadwal Penelitian**

*Terlampir*

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dibuat berdasarkan pada sistematika dalam panduan penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**



Bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, defnisi dari masing-masing variabel yang digunakan, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan hasil data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)**

*Stewardship theory* merupakan teori yang menjelaskan situasi manajer yang termotivasi bukan untuk mendapatkan tujuan individu tetapi termotivasi pada sasaran hasil utama yaitu kepentingan perusahaan. Teori Stewardship menyatakan bahwa manajemen adalah pihak yang dipercaya untuk bertindak sebaik mungkin demi kepentingan publik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Fatmawati & Kiswanto, 2019).

Konsep dalam teori ini didasarkan pada prinsip mempercayai pihak yang diberi wewenang, organisasi atau pemerintah yang tercermin sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya secara penuh tanggung jawab (Susilo et al., 2018). Pemerintah daerah dapat dipercaya bertindak untuk kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tercapai sepenuhnya (Ara et al., 2016).

Dalam *Stewardship theory* rakyat bertindak sebagai “*principal*”, sedangkan pemerintah bertindak sebagai “*steward*”. Menurut *stewardship theory* pemerintah dianggap bekerja berdasarkan motivasi pengabdian dan pelayanan kepada rakyat (Fatmawati & Kiswanto, 2019).

Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah daerah (*steward*) bertanggungjawab menyusun dan mengirimkan laporan keuangan pada BPK untuk diperiksa. Hasil dari pemeriksaan ini sebagai bukti kualitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatkan fasilitas pelayanan. Pemerintah daerah (*steward*) yang termotivasi melakukan tugas dengan baik untuk rakyat (*principal*) memerlukan dukungan aset untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal termasuk dalam belanja daerah, sebagai anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. aset tetap yang dimiliki daerah dapat menjadi sarana atau fasilitas pelayanan kepada publik.

Pemerintah daerah (*steward*) yang termotivasi bertugas secara baik untuk *principal* berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan mengembangkan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *E-Government* dapat memberikan pelayanan secara efisien dan efektif serta dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

### **2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa “kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat

dan/atau dampak”. Pemerintah pusat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemerintah daerah melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Pemerintah daerah wajib menyampaikan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa “Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja”. Sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi, yang dijelaskan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	0-1.00	Rendah
2.	1.01-2.00	Sedang
3.	2.01-3.00	Tinggi
4.	3.01-4.00	Sangat Tinggi

Sumber : PP No. 6 Tahun 2008

### 2.1.3. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah daerah mengelola keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD). Laporan keuangan yang telah disusun dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa “pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan”. BPK melakukan pengawasan dan penelaahan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dilakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan yang disampaikan, kemudian dilakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek aktifitas. Audit BPK juga dilakukan pemeriksaan dengan tujuan, pemeriksaan tidak termasuk keuangan maupun kinerja. Laporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah memuat opini audit, kemudian laporan hasil audit atas kinerja meliputi temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

### **1. Opini Audit**

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa “opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal”. Opini audit merupakan salah satu hasil audit BPK atas laporan keuangan.

Opini audit dapat menjadi standar atau indikator untuk menilai akuntabilitas pemerintah (Meilina et al., 2016). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, opini audit terdapat 4 (empat) jenis, sebagai berikut :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
- c. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)
- d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*)

## **2. Temuan Audit**

Temuan audit merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan sistem pengendalian intern (SPI) maupun temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan audit menurut Ikhtisar Laporan Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan  
Akibat adanya temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat merugikan negara, potensi kerugian negara, berkurangnya penerimaan, penyimpangan administrasi dan terindikasi adanya unsur pidana. Dampak permasalahan ketidakpatuhan merupakan dampak finansial.
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian intern.

c. Temuan 3E

Temuan 3E mengandung permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Permasalahan 3E tidak memiliki dampak finansial.

### **3. Tindak Lanjut Hasil Audit**

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan. Pemerintah daerah harus melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK. Pemerintah daerah yang tidak melakukan tindak lanjut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, BPK akan melakukan pemantauan atau pengawasan. Tindak lanjut yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, yang mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik.

#### **2.1.4. Belanja Daerah**

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan”. Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja operasi
2. Belanja modal
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja transfer

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa, “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”. Aset tetap milik pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat (Pauli & Handayani, 2019). Pemerintah mengalokasikan belanja modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang didasarkan pada kebutuhan daerah.

Belanja modal dapat digunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal seringkali berkaitan erat dengan investasi pemerintah daerah yaitu penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Kusuma & Kurniasih, 2017).

#### **2.1.5. *E-Government***

Menurut UNDESA, (2018), “*E-Government* adalah inovasi berkelanjutan dalam penyampaian layanan, partisipasi publik dan pemerintahan melalui transformasi hubungan eksternal dan internal dengan menggunakan teknologi



informasi, khususnya internet”. *E-Government* berhubungan dengan pengembangan pelayanan publik pemerintah secara *online* kepada masyarakat dan bisnis. Implementasi *e-government* di Indonesia diatur dalam Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Pengembangan *e-government* sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Implementasi *e-government* oleh pemerintah daerah dievaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan hasil evaluasi berupa Pemingkatan *E-Government* Indonesia (PeGi). Penilaian PeGi terakhir berlaku tahun 2017 setelah berlakukannya Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi *e-government* kemudian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), sehingga pemingkatan E-Government (PeGi) diubah menjadi indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Berdasarkan Permenpenrb No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa, “evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE”. Evaluasi SPBE menggunakan metode *Maturity Level* SPBE, dengan mengevaluasi domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan layanan SPBE.

Nilai indeks dan predikat SPBE memiliki 5 klasifikasi, yang dijelaskan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpanrb No. 5 Tahun 2018

## 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun review penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan opini audit BPK, temuan audit BPK, tindak lanjut hasil audit BPK, belanja daerah dan *e-government* yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aladin, Sarikadarwati dan Melani Dwi Safitri (2021)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 15 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Ukuran daerah dan belanja berhubungan, sedangkan Kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berhubungan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

		Tahun 2016-2018)		
2.	Taufik Dasmal, Yesi Mutia Basti dan Novita Indrawati, (2020)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 12 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Kekayaan daerah dan <i>intergovernmental revenue</i> berhubungan positif, sedangkan belanja daerah dan temuan audit tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3.	Luqman Hakim & Endah Nurhenti, (2020)	<i>Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia</i>	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 33 pemerintah provinsi. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Temuan audit berhubungan negatif, sedangkan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, jumlah penduduk dan opini audit tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah provinsi.
4.	Suharyono, (2020)	Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 33 pemerintah provinsi. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	<i>E-government</i> dan opini audit berhubungan positif terhadap kinerja pemerintah provinsi.
5.	Megawati Sukarni Putri & Vita Fitria Sari, (2020)	Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Pengujian Kompleksitas Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Studi	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 19 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Belanja modal berhubungan negatif, sedangkan kekayaan daerah tidak berhubungan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian kekayaan daerah dengan kompleksitas pemerintah dan belanja modal dengan kompleksitas tidak

		Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013 – 2017)		berhubungan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.	Rollis Ayu Ditasari & M. Agus Sudrajat, (2020)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 148 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Temuan audit berhubungan, sedangkan opini audit tidak berhubungan kinerja pemerintah daerah.
7.	Dian Fatmawati & Kiswanto, (2019)	Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, <i>Leverage</i> , Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 109 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Ukuran pemerintah daerah dan tindak lanjut berhubungan positif, sedangkan temuan audit berhubungan negatif dan leverage tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah daerah.
8.	Mega Andani, Sarwani Dan Novita Weningtyas Respati, (2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 238 pemerintah provinsi. Teknik Analisis Data: analisis regresi linier berganda.	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit berhubungan positif, sedangkan belanja modal berhubungan negatif dan kemakmuran daerah tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah.
9.	Fikri Rizki Utama, Einde Evana, dan Rindu Rika Gamayuni, (2019)	<i>The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration</i>	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 293 pemerintah daerah. Teknik Analisis Data: analisis regresi OLS.	Ukuran badan legislatif berhubungan positif, sedangkan belanja modal berhubungan negatif kemudian kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berhubungan terhadap

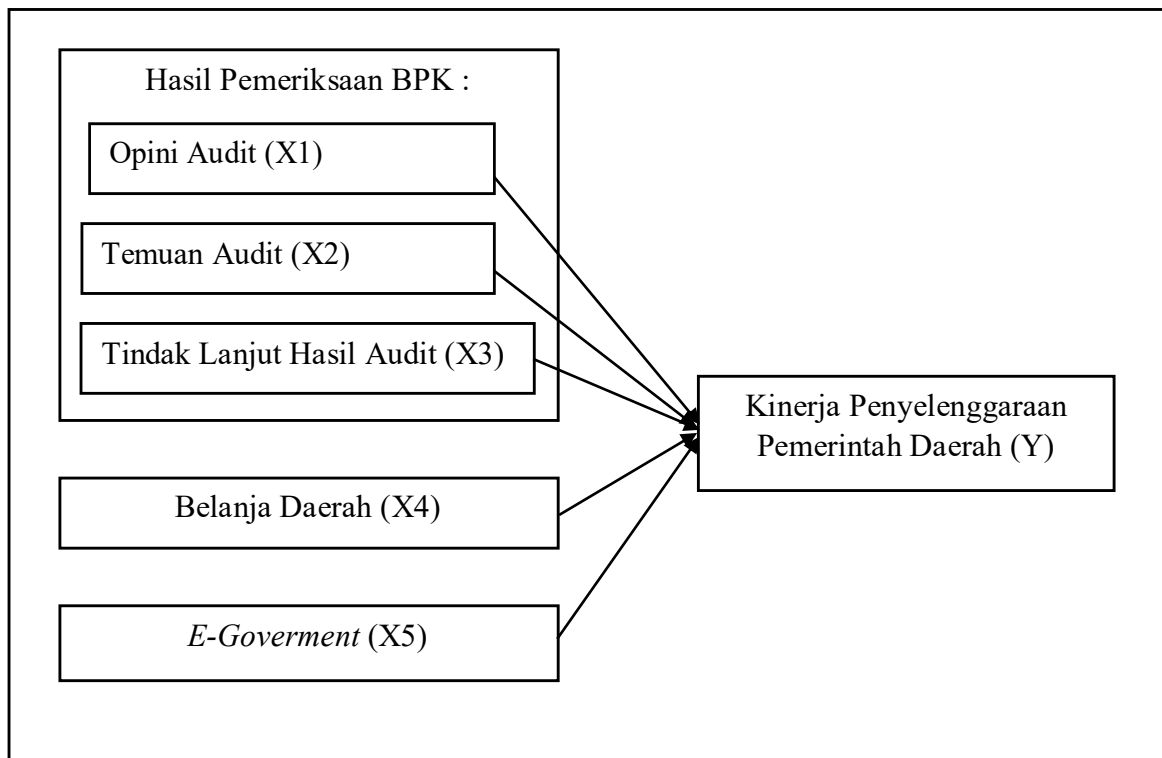
				kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
10.	Maria Octaviani Pauli & Nur Handayani, (2019)	Pengaruh Karakteristik Daerah dan Tingkat Ketidapatuhan SPI Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 344 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Ukuran pemerintah daerah berhubungan, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan tingkat ketidapatuhan SPI berhubungan negatif, dan tingkat kekayaan daerah tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah daerah.
11.	Regina Usman, Fauzan Misra dan Firdaus, (2019)	<i>The Effect of Regional Wealth And Capital Expenditure on Performance: Testing Legislative Power As A Moderating Variable</i>	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 149 Pemerintah provinsi. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Belanja modal berhubungan positif dan kekayaan daerah tidak berhubungan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Variabel <i>legislatif power</i> tidak berhubungan antara kekayaan daerah dengan kinerja penyelenggaraan daerah, sedangkan untuk hubungan antara belanja daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah variabel <i>legislatif power</i> memperlemah hubungan tersebut.
12.	Rizal Qowi & Tri Jatmio Wahyu Prabowo, (2017)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 398 pemerintah daerah.	Tingkat kekayaan berhubungan positif, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit berhubungan negatif

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012	Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.
13.	Priyan Mardya Kusuma & Lulus Kurniasih, (2017)	Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 440 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Opini audit berhubungan positif, sedangkan tingkat ketergantungan berhubungan negatif, kemudian tingkat kekayaan dan belanja daerah tidak berhubungan terhadap kinerja pemerintah daerah.
14.	Bambang Sutopo, Trisnini Ratih Wulandari, Arum Kusumaningdyah Adiati Dan Dany Adi Saputra, (2017)	<i>E-Government, Audit Opinion and Performance of Local Government Administration in Indonesia</i>	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 246 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik Analisis Data: analisis regresi berganda.	<i>E-Government</i> dan opini audit berhubungan positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
15.	Galang Afrian, (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)	Metode penelitian: kuantitatif. Sampel: 60 sampel pemerintah daerah. Teknik Analisis Data: analisis linier berganda.	Tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit dan leverage berhubungan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan penelitian terdahulu maka peneliti membuat kerangka konseptual seperti gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



### 2.4. Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini audit adalah pernyataan profesional tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam konsep *Stewardship theory* menyatakan bahwa pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik untuk rakyat (*principal*). Sehingga pemerintah daerah akan

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang disusun secara jelas dan akuntabel akan menerima opini WTP dan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah baik.

Semakin tinggi opini audit yang diperoleh pemerintah daerah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini didukung dengan penelitian Sutopo et al., (2017), Andani et al., (2019) dan Suharyono, (2020) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

#### **2.4.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah**

Temuan audit merupakan kasus-kasus dalam LKPD yang ditemukan BPK atas pelanggaran kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Ara et al., 2016). Dalam konsep teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik kepada rakyat (*principal*). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan dan berusaha mempercepat kesejahteraan rakyat.



Konsekuensi dari temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan dapat merugikan negara/daerah dan tidak tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga menurunkan kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak temuan pemerintah daerah maka semakin buruk kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini didukung penelitian Qowi & Prabowo, (2017), Fatmawati & Kiswanto, (2019) dan Hakim & Nurhenti, (2020) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **2.3.3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Rekomendasi adalah saran yang diberikan BPK sebagai dasar perbaikan bagi orang atau lembaga yang dipeiksa oleh BPK. Pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti akan diberikan sanksi sesuai hukum. Berdasarkan konsep *stewardship theory* menyatakan bahwa pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik kepada rakyat (*principal*) akan melaksanakan rekomendasi, sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Fatmawati & Kiswanto, (2019) yang menemukan bahwa

tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

#### **2.3.4. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Belanja daerah berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Belanja modal merupakan salah satu kelompok belanja daerah yang bertujuan untuk memperoleh aset pemerintah daerah. Berdasarkan konsep teori stewardship, pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik kepada rakyat (*principal*). Sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan publik, dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah terutama belanja modal. Semakin meningkat penyediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Usman et al., (2019) dan Aladin et al., (2021) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

### **2.3.5. Pengaruh *E-Government* Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

*E-Government* merupakan pemanfaatan informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah agar berbagi informasi dan pelayanan lebih efektif dan efisien. Dalam konsep *Stewardship theory* menyatakan bahwa pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik kepada rakyat (*principal*). Sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan *e-government*. Semakin baik kualitas *e-government* pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini didukung dengan penelitian Sutopo et al., (2017) dan Suharyono, (2020) yang menemukan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : *E-Government* berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian**

Waktu penelitian, rencana dilaksanakan mulai bulan Januari sampai selesai pada tahun 2022. Wilayah penelitian dilaksanakan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah studi tentang gejala atau fenomena yang didasarkan pada populasi atau sampel, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini untuk mengetahui apakah opini audit BPK, temuan audit BPK, tindak lanjut hasil audit BPK, belanja daerah dan *e-government* berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah bidang umum obyek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018. Total populasi adalah 113 kabupaten/kota yang terdiri 84 kabupaten dan 29 kota di Pulau Jawa.

### 3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Prosedur pengambilan sampel dijelaskan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1  
Prosedur Pengambilan Sampel

Sampel	Jumlah Pengamatan
Sampel Awal	113
Data yang tidak tersedia	7
Sampel Akhir	106

Sumber : Data Diolah Penulis, (2022)

### 3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel diambil dari suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu, kriteria tersebut dapat berdasarkan pertimbangan tertentu (Hartono, 2013). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pemerintah daerah di Pulau Jawa yang memperoleh opini audit, temuan audit dan rekomendasi oleh BPK tahun 2018.
2. Pemerintah daerah di Pulau Jawa yang memiliki Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kemenpanrb tahun 2018.
3. Pemerintah daerah di Pulau Jawa yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018.

4. Pemerintah daerah di Pulau Jawa yang memperoleh skor EKPPD oleh Kemendagri tahun 2018.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2010). Periode data pada penelitian ini adalah tahun 2018.

Sumber data dalam penelitian ini untuk data hasil pemeriksaan BPK mengunduh Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari situs [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), data belanja daerah berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), data *e-government* berasal dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diambil dari website <https://www.menpan.go.id/site/> dan data kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diambil dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) melalui website <http://www.otda.kemedagri.go.id/>.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang mengumpulkan data sekunder dengan mencari data yang diperlukan dalam penelitian ke berbagai media yang menyajikan data tersebut.

### **3.6. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah karakteristik atau nilai dari orang, obyek atau aktivitas yang mempunyai perbedaan tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

#### **3.6.1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel ini sering disebut sebagai *stimulus, prediktor, antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau timbulnya dependen (terikat) (Sugiyono, 2010). Adapun variabel bebas dalam penelitian yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja modal dan *e-government*.

#### **3.6.2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel ini biasanya disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **3.7. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2010), operasional variabel adalah hal-hal yang ditentukan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah sebagai variabel terikat, kemudian opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government* sebagai variabel bebas.

Definisi operasional variabel secara ringkas dijelaskan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2  
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian kegiatan/program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006).	Skor kinerja yaitu 0-4 yang terdiri 4 kategori, antara lain : 1) Skor 0-1.00 = Rendah. 2) Skor 1.01-2.00 = Sedang. 3) Skor 2.01-3.00 = Tinggi. 4) Skor 3.01-4.00 = Sangat Tinggi. (Andani et al., 2019)
2.	Opini Audit	Opini adalah pendapat auditor BPK yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (Sutopo et al., 2017).	Skala ordinal, yaitu : 1) Nilai 1 = tidak memberikan pendapat 2) Nilai 2 = opini tidak wajar 3) Nilai 3 = wajar dengan pengecualian 4) Nilai 4 = wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas 5) Nilai 5 = wajar tanpa pengecualian. (Andani et al., 2019)
3.	Temuan Audit	Temuan audit adalah Kasus berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Fatmawati & Kiswanto, 2019).	$\frac{\text{Temuan audit (Rupiah)}}{\text{Total anggaran belanja}}$ (Fatmawati & Kiswanto, 2019)



4.	Tindak Lanjut Hasil Audit	Tindak lanjut hasil audit adalah kegiatan atau keputusan pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang berwenang untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit (Fatmawati & Kiswanto, 2019).	<i>Tindak lanjut <u>sesuai rekomendasi</u> total rekomendasi</i> (Fatmawati & Kiswanto, 2019)
5.	Belanja Daerah	Belanja daerah adalah suatu kewajiban daerah, salah satunya belanja modal yang memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Halim, 2014).	<i>Realisasi Belanja modal</i> $\frac{\text{Total Realisasi}}{\text{Belanja Daerah}}$ (Putri & Sari, 2020)
6.	<i>E-Government</i>	<i>E-Government</i> adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi administrasi pemerintah serta menyediakan layanan kepada masyarakat (Sutopo et al., 2017)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu 0-5 dengan 5 kategori, antara lain : 1) Indeks 4,2-5,0 = Memuaskan. 2) Indeks 3,5 -< 4,2 = Sangat Baik. 3) Indeks 2,6 -< 3,5 = Baik. 4) Indeks 1,8 -< 2,6 = Cukup . 5) < 1,8 = Kurang. (Ikhsan et al., 2021)

### 3.8. Teknik analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *E-Views*

12. Penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda.

### 3.8.1. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat distribusi variabel yang diteliti. Distribusi normal suatu variabel dapat diungkap dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas dengan menggunakan grafik terkadang bersifat subyektif, sehingga diuji menggunakan uji statistik *Jarque-Bare* dengan kriteria nilai signifikansi di atas 0,05 atau  $>0,05$  maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi di bawah 0,05 atau  $<0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi ditemukan korelasi (hubungan) antar variabel bebas (*independent*) yang satu dengan variabel bebas (*independent*) lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi hubungan antar variabel bebas (*independent*) (Ghozali, 2018). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* di atas 0,1 atau  $\geq 0,1$  dan VIF di bawah 10 atau  $\leq 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya, jika nilai *Tolerance* di bawah 0,1 atau  $\leq 0,1$  dan VIF di atas 10 atau  $\geq 10$  maka terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi adanya ketidaksamaan *variance* pada nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang homogen atau tidak terjadi heterogen. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji *white*, jika nilai probabilitas *Obs\*R-squared* di atas 0,05 atau  $>0,05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya, jika nilai probabilitas *Obs\*R-squared* di bawah 0,05 atau  $<0,05$  maka terjadi heterokedastisitas pada model penelitian.

### 4. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki hubungan (korelasi) antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dan periode sebelumnya atau tidak (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi diuji menggunakan uji *Durbin-Waston* (DW test), adapun aturan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Tabel Keputusan *Durbin-Waston*

Hipotesis Awal	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif, atau negatif	Tidak tolak	$du \leq d \leq 4-du$

Sumber : Ghozali, (2018)

### 3.8.2. Uji Ketepatan Model

#### 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (*independent*) dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Nilai signifikansi F dapat dilihat pada output hasil regresi menggunakan *E-Views* pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nilai signifikansi yang baik harus di bawah 0,05. Dikatakan berpengaruh, jika nilai signifikansi di bawah 0,05 atau  $<0,05$ . Sedangkan dikatakan tidak berpengaruh, jika nilai signifikansinya di atas 0,05 atau  $>0,05$ .

#### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran kemampuan model dalam menjelaskan perbedaan variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara nol sampai satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 (satu) berarti model semakin kuat dalam menjelaskan variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) dan nilai  $R^2$  yang mendekati 0 (nol) berarti model semakin lemah dalam menjelaskan variabel terikat (*dependent*).

### 3.8.3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*dependen*) terhadap variabel terikat (*independent*) (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a : Konstanta

$\beta_{1...5}$  : Koefisien Determinasi

X<sub>1</sub> : Opini Audit

X<sub>2</sub> : Temuan Audit

X<sub>3</sub> : Tindak Lanjut Hasil Audit

X<sub>4</sub> : Belanja Daerah

X<sub>5</sub> : *E-Government*

e : *Error*

#### 3.8.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini dalam uji hipotesis menggunakan uji t. Uji t menunjukkan derajat pengaruh individual variabel bebas (*independent*) dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Caranya adalah membandingkan probabilitas (*P-value*) dengan tingkat signifikan 0,05 dan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 atau  $<0,05$  dan  $t_{hitung}$  di atas  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya, jika nilai probabilitas di atas 0,05 atau  $>0,05$  dan  $t_{hitung}$  di bawah  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada rentang waktu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program pengolahan data *E-Views* 12. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2018. Adapun pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria yang ditentukan peneliti.

Berdasarkan metode penelitian pengambilan sampel tersebut diperoleh sebanyak 106 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018. Berikut merupakan nama-nama pemerintah kabupaten/kota yang terpilih menjadi sampel penelitian pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1  
Data Nama Pemerintah Kabupaten/Kota Sampel

No.	Nama Instansi	Daerah	No.	Nama Instansi	Daerah
1	Kab Banjarnegara	Jawa Tengah	54	Kota Cimahi	Jawa Barat
2	Kab Banyumas	Jawa Tengah	55	Kota Cirebon	Jawa Barat
3	Kab Batang	Jawa Tengah	56	Kota Sukabumi	Jawa Barat
4	Kab Blora	Jawa Tengah	57	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
5	Kab Boyolali	Jawa Tengah	58	Kab Bantul	Yogyakarta
6	Kab Brebes	Jawa Tengah	59	Kab Kulon Progo	Yogyakarta
7	Kab Cilacap	Jawa Tengah	60	Kab Sleman	Yogyakarta
8	Kab Demak	Jawa Tengah	61	Kota Yogyakarta	Yogyakarta
9	Kab Grobogan	Jawa Tengah	62	Kab Bangkalan	Jawa Timur
10	Kab Jepara	Jawa Tengah	63	Kab Banyuwangi	Jawa Timur

11	Kab Karanganyar	Jawa Tengah	64	Kab Blitar	Jawa Timur
12	Kab Kebumen	Jawa Tengah	65	Kab Bojonegoro	Jawa Timur
13	Kab Kendal	Jawa Tengah	66	Kab Bondowoso	Jawa Timur
14	Kab Klaten	Jawa Tengah	67	Kab Gresik	Jawa Timur
15	Kab Kudus	Jawa Tengah	68	Kab Jember	Jawa Timur
16	Kab Magelang	Jawa Tengah	69	Kab Jombang	Jawa Timur
17	Kab Pati	Jawa Tengah	70	Kab Kediri	Jawa Timur
18	Kab Pekalongan	Jawa Tengah	71	Kab Lamongan	Jawa Timur
19	Kab Pemasang	Jawa Tengah	72	Kab Lumajang	Jawa Timur
20	Kab Purbalingga	Jawa Tengah	73	Kab Madiun	Jawa Timur
21	Kab Purworejo	Jawa Tengah	74	Kab Magetan	Jawa Timur
22	Kab Rembang	Jawa Tengah	75	Kab Malang	Jawa Timur
23	Kab Semarang	Jawa Tengah	76	Kab Mojokerto	Jawa Timur
24	Kab Sragen	Jawa Tengah	77	Kab Nganjuk	Jawa Timur
25	Kab Sukoharjo	Jawa Tengah	78	Kab Ngawi	Jawa Timur
26	Kab Tegal	Jawa Tengah	79	Kab Pacitan	Jawa Timur
27	Kab Temanggung	Jawa Tengah	80	Kab Pamekasan	Jawa Timur
28	Kab Wonosobo	Jawa Tengah	81	Kab Pasuruan	Jawa Timur
29	Kota Magelang	Jawa Tengah	82	Kab Ponorogo	Jawa Timur
30	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	83	Kab Probolinggo	Jawa Timur
31	Kota Salatiga	Jawa Tengah	84	Kab Sampang	Jawa Timur
32	Kota Semarang	Jawa Tengah	85	Kab Sidoarjo	Jawa Timur
33	Kota Surakarta	Jawa Tengah	86	Kab Situbondo	Jawa Timur
34	Kota Tegal	Jawa Tengah	87	Kab Sumenep	Jawa Timur
35	Kab. Bandung	Jawa Barat	88	Kab Trenggalek	Jawa Timur
36	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	89	Kab Tuban	Jawa Timur
37	Kab Bekasi	Jawa Barat	90	Kab Tulungagung	Jawa Timur
38	Kab Bogor	Jawa Barat	91	Kota Batu	Jawa Timur
39	Kab Ciamis	Jawa Barat	92	Kota Blitar	Jawa Timur
40	Kab Cianjur	Jawa Barat	93	Kota Kediri	Jawa Timur
41	Kab Cirebon	Jawa Barat	94	Kota Madiun	Jawa Timur
42	Kab Garut	Jawa Barat	95	Kota Malang	Jawa Timur
43	Kab Indramayu	Jawa Barat	96	Kota Pasuruan	Jawa Timur
44	Kab Karawang	Jawa Barat	97	Kota Probolinggo	Jawa Timur
45	Kab Kuningan	Jawa Barat	98	Kota Surabaya	Jawa Timur
46	Kab Pangandaran	Jawa Barat	99	Kab Lebak	Banten
47	Kab Purwakarta	Jawa Barat	100	Kab Pandeglang	Banten
48	Kab Subang	Jawa Barat	101	Kab Serang	Banten

49	Kab Sukabumi	Jawa Barat	102	Kab Tangerang	Banten
50	Kab Sumedang	Jawa Barat	103	Kota Cilegon	Banten
51	Kota Bandung	Jawa Barat	104	Kota Serang	Banten
52	Kota Bekasi	Jawa Barat	105	Kota Tangerang	Banten
53	Kota Bogor	Jawa Barat	106	Kota Tangerang Selatan	Banten

Sumber : Data Diolah Penulis, (2022)

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum pada penelitian, sehingga diketahui karakteristik sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif data penelitian ini dengan menggunakan *E-Views*, dijelaskan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	3.316233	4.886792	0.001491	0.846658	0.178777	2.390660
Median	3.333650	5.000000	0.000942	0.955457	0.172504	2.356667
Maximum	3.559100	5.000000	0.010405	1.000000	0.311767	3.613333
Minimum	3.009400	3.000000	0.000116	0.050089	0.088364	1.380000
Std. Dev.	0.131456	0.464363	0.001616	0.235914	0.045404	0.533671
Skewness	-0.279425	-3.837534	3.045420	-1.840665	0.637963	0.086810
Kurtosis	2.404259	15.72667	14.32497	5.509795	3.375389	2.266896
Jarque-Bera Probability	2.946887 0.229135	975.5300 0.000000	730.3107 0.000000	87.67644 0.000000	7.812656 0.020114	2.506838 0.285527
Sum	351.5207	518.0000	0.158055	89.74575	18.95037	253.4100
Sum Sq. Dev.	1.814460	22.64151	0.000274	5.843835	0.216461	29.90452
Observations	106	106	106	106	106	106

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan tabel di atas variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) diukur berdasarkan skor EKPPD yang dikeluarkan Kemendagri. Sehingga nilai *median* (tengah) sebesar 3,333650, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 3,559100 yaitu pemerintah kabupaten Banyuwangi dan nilai *minimum* (terendah) sebesar 3,009400 yaitu pemerintah kota Batang, serta nilai standar deviasi sebesar 0,131456. Kemudian nilai *mean* (rata-rata) variabel ini sebesar 3,316233, yang



artinya pemerintah kabupaten/kota yang digunakan penelitian ini rata-rata memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebesar 3,31%.

Variabel opini audit (X1) diukur menggunakan skala ordinal 1-5. Nilai *mean* (rata-rata) variabel ini sebesar 4,886792, kemudian nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 5, pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP sebanyak 100 pemerintahan, nilai *minimum* (terendah) sebesar 3 sebanyak 6 pemerintahan, serta nilai standar deviasi sebesar 0,462297.

Variabel temuan audit (X2) diukur dengan membagi temuan audit (Rp) dengan total anggaran belanja. Nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,001491, kemudian nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 0,010405 yang merupakan pemerintah kabupaten Cirebon, nilai *minimum* (terendah) sebesar 0,000116 yang merupakan pemerintah kabupaten Pasuruan, serta nilai standar deviasi sebesar 0,001616.

Variabel tindak lanjut hasil audit (X3) diukur dengan membagi tindak lanjut sesuai rekomendasi dengan total rekomendasi. Nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,846658, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 1 yang dimiliki 43 pemerintahan, kemudian nilai *minimum* (terendah) sebesar 0,050089 dimiliki pemerintah kabupaten Sleman, serta nilai standat deviasi sebesar 0,235914.

Variabel belanja daerah (X4) diukur dengan membagi realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0,178777, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 0,311767 yang dimiliki pemerintah kota Tangerang Selatan, kemudian nilai *minimum* (terendah) sebesar 0,088364

dimiliki pemerintah kabupaten Kuningan, serta nilai standar deviasi sebesar 0,045404.

Variabel *e-government* (X5) diukur menggunakan indeks SPBE yang dikeluarkan Kemenpanrb. Nilai *mean* (rata-rata) sebesar 2,390660, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 3,613333 yang dimiliki pemerintah kota Surabaya, kemudian nilai *minimum* (terendah) sebesar 1,380000 yang dimiliki pemerintah kabupaten Sampang, serta nilai standar deviasi sebesar 0,533671.

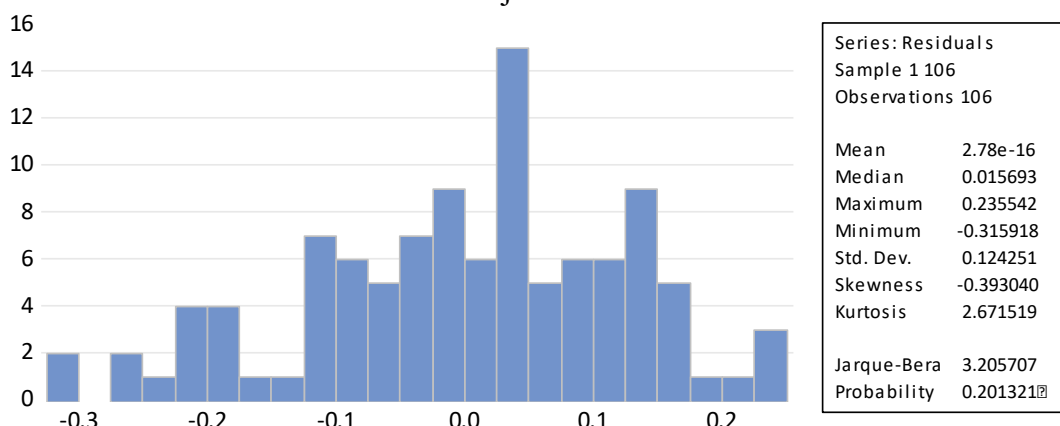
## 4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 4.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji statistik *Jarque-Bare*, model berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1  
Hasil Uji Normalitas



Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 6.1 di atas diketahui nilai *Jarque-Bare* sebesar 3,205707 dan nilai *probability* signifikan sebesar 0,201321 yang menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi (hubungan) antar variabel atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi bebas multikoleniaritas, jika *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 atau  $< 10$ , dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau  $> 0,1$ . Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.026081	170.5419	NA
X1	0.000739	116.4031	1.031927
X2	65.87225	2.071650	1.113969
X3	0.003030	15.29571	1.092362
X4	0.076688	17.05157	1.024041
X5	0.000577	22.63120	1.064578

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai VIF seluruh variabel di bawah dari 10 dan nilai *tolerance* di atas dari 0,1, yang artinya data penelitian ini tidak ada korelasi (hubungan) antara variabel bebas (*independent*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi adanya ketidaksamaan *variance* pada nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Penelitian ini dalam pengujian heterokedastisitas menggunakan metode uji *white*. Ada tidaknya heterokedastisitas, jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 atau  $>0,05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4  
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.247431	Prob. F(19,86)	0.2408
Obs*R-squared	22.90154	Prob. Chi-Square(19)	0.2417
Scaled explained SS	17.03469	Prob. Chi-Square(19)	0.5875

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,2417. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas *Obs\*R-squared* di atas 0,05 atau  $>0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi (hubungan) antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dan periode sebelumnya atau tidak (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi dilakukan dengan

uji *Durbin-Waston* (DW test). Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

<u>D</u>	<u>dL</u>	<u>dU</u>	<u>4-dU</u>	<u>4-dL</u>	Daerah Pengujian
2,437379	1,5861	1,7834	2,2166	2,4139	$4-dL < d$

Sumber : Data diolah penulis, (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  $d$  lebih besar dari  $4-dL$  yang artinya terdapat autokorelasi negatif pada model penelitian, karena dalam penelitian terdapat autokorelasi negatif maka diperlukannya perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan dengan transformasi variabel dengan metode *Cochrane-Orcutt*, dimulai dengan perhitungan  $\rho$  menggunakan nilai estimasi *error* kemudian membandingkan nilai DW dengan  $d_{\text{tabel}}$  (Gujarati, 2003). Setelah dilakukan proses perbaikan, maka hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Perbaikan Uji Autokorelasi

<u>D</u>	<u>dL</u>	<u>dU</u>	<u>4-dU</u>	<u>4-dL</u>	Daerah Pengujian
1,908106	1,5861	1,7834	2,2166	2,4139	$dU < d < 4-dU$

Sumber : Data diolah penulis, (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil uji autokorelasi  $dU < d < 4-dU$  yang merupakan merupakan nilai *Durbin Watson*,  $dU$  adalah nilai *Durbin Watson Upper* dan  $dL$  adalah *Durbin Watson Lower*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian.

#### 4.2.2. Hasil Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji F

Uji F bertujuan mengetahui apakah semua variabel bebas (*independent*) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi di atas 0,05 atau  $>0,05$  berarti variabel independen secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7  
Hasil Uji F

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan hasil uji F di atas, diketahui nilai prob. F-statistic sebesar 0,043334, di dibawah dari 0,05 atau  $<0,05$  yang artinya variabel independen berupa opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government* secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebagai ukuran kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menggunakan *Adjusted R-Squared*

pada persamaan regresi. Adapun hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui nilai *Adjusted R-Squared* pada persamaan sebesar 0,061936 atau 6,19%. Hal ini menunjukkan bahwa 6,19% variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, belanja daerah dan *e-government*. Sedangkan 93,81% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar variabel penelitian ini.

#### 4.2.3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Penelitian ini terdapat variabel terikat (*dependent*) yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) dan variabel bebas (*independent*) terdiri atas opini audit (X1), temuan audit (X2), tindak lanjut hasil audit (X3), belanja daerah (X4) dan *e-government* (X5). Adapun hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.040640	0.161495	18.82812	0.0000
X1	0.054718	0.027181	2.013071	0.0468
X2	-18.00711	8.116172	-2.218671	0.0288
X3	-0.036433	0.055047	-0.661856	0.5096
X4	0.192058	0.276926	0.693534	0.4896
X5	0.013202	0.024022	0.549560	0.5838

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas, maka persamaan regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,040640 + 0,054718X_1 - 18,00711X_2 - 0,036433X_3 + 0,192058X_4 + 0,013202X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 3,040640 artinya jika seluruh variabel bebas (*independent*) sama dengan nol (0), maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) bernilai 3,040640.
2. Koefisien opini audit (X1) sebesar 0,054718 artinya jika opini audit (X1) naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,054718.
3. Koefisien temuan audit (X2) sebesar -18,00711 artinya jika temuan audit (X2) meningkat satu satuan, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) akan turun sebesar 18,00711, dengan asumsi variabel lain tidak berubah.



4. Koefisien tindak lanjut hasil audit (X3) sebesar  $-0,036433$  artinya jika tindak lanjut hasil audit (X3) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) akan turun sebesar  $0,036433$ .
5. Koefisien belanja daerah (X4) sebesar  $0,192058$  yang artinya jika belanja daerah (X4) bertambah satu satuan dengan asumsi variabel lain tidak berubah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar  $0,192058$ .
6. Koefisien *e-government* (X5) sebesar  $0,013202$  artinya jika *e-government* (X5) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain berubah, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar  $0,013202$ .

#### 4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Uji t untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh secara individual variabel bebas (*independent*) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan menggunakan kriteria *p-value* di bawah  $0,05$  atau  $<0,05$  dan  $t_{hitung}$  di atas  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ), maka variabel bebas (*independent*) berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*). Adapun hasil uji t pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10  
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.040640	0.161495	18.82812	0.0000
X1	0.054718	0.027181	2.013071	0.0468
X2	-18.00711	8.116172	-2.218671	0.0288
X3	-0.036433	0.055047	-0.661856	0.5096
X4	0.192058	0.276926	0.693534	0.4896
X5	0.013202	0.024022	0.549560	0.5838

Sumber : output *E-Views* 12, (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diketahui hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi opini audit sebesar 0,0468, di bawah 0,05 dan t hitung sebesar 2,013071 di atas t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,054718 yang artinya opini audit (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

2. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan temuan audit sebesar 0,0288, di bawah 0,05 dan t hitung sebesar -2,218671 di atas t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar -18,00711 yang artinya temuan audit (X2) berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

3. Tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai sigifikansi tindak lanjut hasil audit sebesar 0,5096, di atas 0,05 dan t hitung sebesar -0,661856 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar -0,036433 yang artinya tindak lanjut hasil audit (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

4. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi belanja daerah sebesar 0,4896, di atas 0,05 dan t hitung sebesar 0,693534 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,192058 yang artinya belanja daerah (X4) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

5. *E-Government* tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi *e-government* sebesar 0,5838, di atas 0,05 dan t hitung sebesar 0,549560 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,013202 yang artinya *e-government* (X5) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

### 4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian data dan analisis di atas, maka dapat dijelaskan hasil hipotesis penelitian pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Nama Variabel	Signifikansi	Keterangan
1.	Opini audit	0,0468	H1 (diterima)
2.	Temuan audit	0,0288	H2 (diterima)
3.	Tindak lanjut hasil audit	0,5096	H3 (ditolak)
4.	Belanja daerah	0,4896	H4 (ditolak)
5.	<i>E-Government</i>	0,5838	H5 (ditolak)

Sumber : Data diolah penulis, (2022).

#### 4.3.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui nilai prob. Uji t opini audit sebesar 0,0468, di bawah 0,05 dan t hitung sebesar 2,013071 di atas t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,054718. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa opini audit (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y), yang artinya H1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi opini audit yang diperoleh pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini WTP membuktikan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan dengan baik, karena telah menyajikan informasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas SPI.

Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah di Pulau Jawa yang tinggi sebesar 94%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa mengelola keuangan dengan baik sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Pulau Jawa juga baik. Hal ini sesuai dengan teori stewardship (pengabdian), pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik untuk rakyat (*principal*) akan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. BPK memberikan opini sesuai dengan penyajian informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang wajar sesuai kriteria akan mendapatkan opini WTP. Sehingga opini WTP membuktikan pemerintah daerah telah mengelola keuangan dengan baik dan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutopo et al., (2017), Andani et al., (2019) dan Suharyono, (2020).

#### **4.3.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui nilai prob. Uji t sebesar 0,0288, di bawah 0,05 dan t hitung sebesar -2,218671 di atas t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar -18,00711. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa temuan audit (X2) berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y), sehingga H2 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit yang ditemukan dapat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Temuan audit dapat berupa sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan 3E (ketidakefektifan, ketidakefisiensi dan ketidakhematan). Temuan audit terkait ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dapat merugikan keuangan negara/daerah dan dampak finansial lainnya. Sehingga jumlah temuan audit menunjukkan besarnya kerugian finansial yang diterima negara/daerah yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin menurun.

Jumlah temuan audit pada pemerintah daerah di Pulau Jawa sebanyak 2.463 temuan, menunjukkan bahwa jumlah temuan audit cukup tinggi. Tingginya jumlah temuan audit ini menunjukkan pemerintah daerah lebih mementingkan kesejahteraan individu dibandingkan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara/daerah, sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya Pulau Jawa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* (pengabdian), dimana pemerintah daerah (*steward*) termotivasi bertugas dengan baik untuk rakyat (*principal*) akan mengikuti regulasi yang ada dan berusaha mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Qowi & Prabowo, (2017), Fatmawati & Kiswanto, (2019) dan Hakim & Nurhenti, (2020).

### **4.3.3. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa nilai prob. Uji t sebesar 0,5096, di atas dari 0,05 dan t hitung sebesar -0,661856 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar -0,036433. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y), yang artinya H3 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Rekomendasi yang diberikan BPK sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada pemerintah daerah baik keuangan maupun administrasi. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah di Pulau Jawa yang tinggi tidak menunjukkan pemerintah daerah menindaklanjuti semua permasalahan yang ditemukan BPK. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih fokus menindaklanjuti permasalahan keuangan dibandingkan permasalahan yang lainnya.

Rasio tindak lanjut hasil audit tertinggi yaitu 1 dimiliki oleh 43 pemerintahan dan rasio tindak lanjut hasil audit terendah yaitu 0,050089 adalah kabupaten Sleman. Pemerintah daerah dengan rasio tindak lanjut hasil audit tertinggi dan terendah memiliki skor EKPPD dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan banyak sedikitnya tindaklanjut, pemerintah daerah tetap memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

Pemerintah daerah kurang maksimal dalam melaksanakan tindak lanjut, karena terbatasnya waktu yang diberikan BPK untuk pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sehingga tindak lanjut hasil audit belum bisa mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fatmawati & Kiswanto, (2019), menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **4.3.4. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui nilai prob. Uji t sebesar 0,4896, di atas 0,05 dan t hitung sebesar 0,693534 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,192058. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa belanja daerah (X4) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y), yang artinya H4 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya alokasi anggaran belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari : belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Alokasi belanja daerah yang terbagi menjadi 4 menyebabkan pemerintah daerah kurang maksimal dalam mengalokasi belanja modal dan penyediaan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat.



Rasio belanja daerah terrendah yaitu 0,088364 dimiliki oleh kabupaten Kuningan, yang mendapat skor EKPPD sebesar 3,4393 dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan anggaran belanja modal yang besar maupun kecil tetap memiliki kinerja penyelenggaraan yang baik.

Alokasi anggaran belanja daerah yang tinggi pada pemerintah daerah di Pulau Jawa tidak menunjukkan bahwa pemerintah daerah fokus pada belanja modal untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas publik. Karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional bukan belanja modal. Sehingga belanja daerah belum bisa mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dasmal et al., (2020) dan Kusuma & Kurniasih, (2017).

#### **4.3.5. Pengaruh *E-Government* Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui nilai prob. Uji t sebesar 0,5838, di atas 0,05 dan t hitung sebesar 0,549560 di bawah t tabel sebesar 1,98282, serta nilai koefisien sebesar 0,013202. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa *e-government* (X5) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y), yang artinya H5 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya indeks SPBE yang diperoleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018 tingkat kematangan SPBE secara nasional masih rendah, indeks SPBE sebesar 1,98 dengan

predikat kurang. Sedangkan indeks SPBE pemerintah kabupaten/kota khususnya Pulau Jawa rata-rata sebesar 2,39 dengan predikat cukup.

Rendahnya indeks SPBE pemerintah daerah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pengembangan SPBE yang dilaksanakan pemerintah daerah kurang maksimal, dikarenakan TIK yang semakin canggih, *e-government* belum diterapkan secara menyeluruh dan optimal pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga *e-government* belum bisa mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suharyono, (2020) dan Sutopo et al., (2017), menyatakan bahwa *e-governement* berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh hasil pemeriksaan BPK, belanja daerah dan *e-government* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin tinggi opini audit yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin meningkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak temuan audit yang ditemukan maka semakin menurun kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Banyak sedikitnya tindaklanjut pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Besar kecilnya alokasi anggaran belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. *E-Governemnt* tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Besar kecilnya indeks SPBE yang diperoleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut antara lain :

1. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 6,19%, sehingga 93,81% dijelaskan variabel independen lain diluar penelitian ini.
2. Objek pada penelitian ini relatif sempit dan sedikit, yaitu hanya menggunakan 106 pemerintah kabupaten/kota pada Pulau Jawa.
3. Tahun pengambilan sampel hanya menggunakan tahun 2018, karena keterbatasan memperoleh data EKPPD tahun penelitian terbaru sehingga tidak dapat menggunakan data terbaru yang lebih representatif pada penelitian ini.

## **5.3. Saran**

Adapun penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya. Beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan dan/atau menambah variabel bebas (*independent*) lainnya yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas objek penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data EKPPD terbaru agar hasil penelitian lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, G. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM FEKON*, 3(1), 1036–1050.
- Aladin, Sarikadarwati, & Safitri, M. D. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntanika*, 7(2), 195–206.
- Andani, M., Sarwani, & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130.
- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *JAFFA*, 04(1), 1–17.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia (Pertama)*. BPFE UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi.
- Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. (2019). *Penyerahan IHPS I Tahun 2019 dari BPK Kepada DPD*. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). <https://www.bpk.go.id/news/penyerahan-ihps-i-tahun-2019-dari-bpk-kepada-dpd>
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2(16), 39–57.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *IVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104–117.
- Fatmawati, D., & Kiswanto. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit-UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics (Third)*. Mc. Graw-Hill.

- Hakim, L., & Nurhenti, E. (2020). Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia. *WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 10(2), 171–178.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan belanja negara/aerah)*. Salemba Empat.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman)* (6th ed.). BPFE.
- Humas Menpanrb. (2021). *Indeks SPBE 2020 Meningkat, Pemerintah Tidak Berpuas Diri*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-2020-meningkat-pemerintah-tidak-berpuas-diri>
- Ikhsan, S., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). Analysis of Factors Affecting the Level of E-Government Implementation in West Java. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5(1), 123–134. <https://doi.org/10.36555/jasa.v5i1.1491>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, (2003).
- Kaho, J. R. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, P. M., & Kurniasih, L. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *EQUITY*, 20(1), 51–66.
- Meilina, Z. D., Hapsari, D. W., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3475–3483.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (2009).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Eevaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik, (2018).
- Pauli, M. O., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Karakteristik Daerah dan Tingkat Ketidakpatuhan SPI Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–19.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah, (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (2006).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).
- Putri, M. S., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013 – 2017). *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3085–3106. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/26>
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA.
- Suharyono. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Neraca*, 4(1), 11–25. <https://doi.org/10.31851/neraca.v4i1.4148>
- Susilo, T., Aji, W., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2015. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 153–170. <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab>
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government , Audit Opinion , and Performance of Local Government Administration in Indonesia E-Government , Audit Opinion , and Performance of Local Government. *Australasian Accountig, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (2004).
- UNDESA. (2018). *United Nations E-Government Survey 2018*. United Nations.
- Usman, R., Misra, F., & Firdaus. (2019). The Effect of Regional Wealth and Capital Expenditure on Performance: Testing Legislative Power As A Moderating



Variable. *E-JA: E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 561–576. Regional Wealth, Capital Expenditures, Legislative Power and Performance of Local Government Operation

Utama, F. R., Evana, E., & Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 197–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/irjbs>.

# LAMPIRAN



No	Bulan Kegiatan	September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal								
2	Konsultasi								
3	Revisi Proposal								
4	Pengumpulan Data								
5	Analisis Data								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								
7	Pendaftaran Munaqasah	X							
8	Munaqasah					X			
9	Revisi Munaqasah					X	X		

## Lampiran 2 Sampel Penelitian

No.	Nama Instansi	Daerah	No.	Nama Instansi	Daerah
1	Kab Banjarnegara	Jawa Tengah	54	Kota Cimahi	Jawa Barat
2	Kab Banyumas	Jawa Tengah	55	Kota Cirebon	Jawa Barat
3	Kab Batang	Jawa Tengah	56	Kota Sukabumi	Jawa Barat
4	Kab Blora	Jawa Tengah	57	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
5	Kab Boyolali	Jawa Tengah	58	Kab Bantul	Yogyakarta
6	Kab Brebes	Jawa Tengah	59	Kab Kulon Progo	Yogyakarta
7	Kab Cilacap	Jawa Tengah	60	Kab Sleman	Yogyakarta
8	Kab Demak	Jawa Tengah	61	Kota Yogyakarta	Yogyakarta
9	Kab Grobogan	Jawa Tengah	62	Kab Bangkalan	Jawa Timur
10	Kab Jepara	Jawa Tengah	63	Kab Banyuwangi	Jawa Timur
11	Kab Karanganyar	Jawa Tengah	64	Kab Blitar	Jawa Timur
12	Kab Kebumen	Jawa Tengah	65	Kab Bojonegoro	Jawa Timur
13	Kab Kendal	Jawa Tengah	66	Kab Bondowoso	Jawa Timur
14	Kab Klaten	Jawa Tengah	67	Kab Gresik	Jawa Timur
15	Kab Kudus	Jawa Tengah	68	Kab Jember	Jawa Timur
16	Kab Magelang	Jawa Tengah	69	Kab Jombang	Jawa Timur
17	Kab Pati	Jawa Tengah	70	Kab Kediri	Jawa Timur
18	Kab Pekalongan	Jawa Tengah	71	Kab Lamongan	Jawa Timur
19	Kab Pemasang	Jawa Tengah	72	Kab Lumajang	Jawa Timur
20	Kab Purbalingga	Jawa Tengah	73	Kab Madiun	Jawa Timur
21	Kab Purworejo	Jawa Tengah	74	Kab Magetan	Jawa Timur
22	Kab Rembang	Jawa Tengah	75	Kab Malang	Jawa Timur
23	Kab Semarang	Jawa Tengah	76	Kab Mojokerto	Jawa Timur
24	Kab Sragen	Jawa Tengah	77	Kab Nganjuk	Jawa Timur
25	Kab Sukoharjo	Jawa Tengah	78	Kab Ngawi	Jawa Timur
26	Kab Tegal	Jawa Tengah	79	Kab Pacitan	Jawa Timur
27	Kab Temanggung	Jawa Tengah	80	Kab Pamekasan	Jawa Timur
28	Kab Wonosobo	Jawa Tengah	81	Kab Pasuruan	Jawa Timur
29	Kota Magelang	Jawa Tengah	82	Kab Ponorogo	Jawa Timur
30	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	83	Kab Probolinggo	Jawa Timur
31	Kota Salatiga	Jawa Tengah	84	Kab Sampang	Jawa Timur
32	Kota Semarang	Jawa Tengah	85	Kab Sidoarjo	Jawa Timur
33	Kota Surakarta	Jawa Tengah	86	Kab Situbondo	Jawa Timur
34	Kota Tegal	Jawa Tengah	87	Kab Sumenep	Jawa Timur
35	Kab Bandung	Jawa Barat	88	Kab Trenggalek	Jawa Timur
36	Kab Bandung Barat	Jawa Barat	89	Kab Tuban	Jawa Timur
37	Kab Bekasi	Jawa Barat	90	Kab Tulungagung	Jawa Timur

38	Kab Bogor	Jawa Barat	91	Kota Batu	Jawa Timur
39	Kab Ciamis	Jawa Barat	92	Kota Blitar	Jawa Timur
40	Kab Cianjur	Jawa Barat	93	Kota Kediri	Jawa Timur
41	Kab Cirebon	Jawa Barat	94	Kota Madiun	Jawa Timur
42	Kab Garut	Jawa Barat	95	Kota Malang	Jawa Timur
43	Kab Indramayu	Jawa Barat	96	Kota Pasuruan	Jawa Timur
44	Kab Karawang	Jawa Barat	97	Kota Probolinggo	Jawa Timur
45	Kab Kuningan	Jawa Barat	98	Kota Surabaya	Jawa Timur
46	Kab Pangandaran	Jawa Barat	99	Kab Lebak	Banten
47	Kab Purwakarta	Jawa Barat	100	Kab Pandeglang	Banten
48	Kab Subang	Jawa Barat	101	Kab Serang	Banten
49	Kab Sukabumi	Jawa Barat	102	Kab Tangerang	Banten
50	Kab Sumedang	Jawa Barat	103	Kota Cilegon	Banten
51	Kota Bandung	Jawa Barat	104	Kota Serang	Banten
52	Kota Bekasi	Jawa Barat	105	Kota Tangerang	Banten
53	Kota Bogor	Jawa Barat	106	Kota Tangerang Selatan	Banten

Lampiran 3 Tabulasi Data

No.	Nama Instansi	Daerah	Kinerja Pemda	Opini	Temuan	TLHA	Belanja Daerah	<i>E-Government</i>
1	Kab Banjarnegara	Jawa Tengah	3,1098	5	0,0018024	0,398626144	0,223966982	1,74
2	Kab Banyumas	Jawa Tengah	3,4773	5	0,00053355	0,952496881	0,158302899	2,633333333
3	Kab Batang	Jawa Tengah	3,0094	5	0,000954231	0,962872833	0,096846525	3,39
4	Kab Blora	Jawa Tengah	3,3016	5	0,000258581	1	0,235977107	2,066666667
5	Kab Boyolali	Jawa Tengah	3,4617	5	0,000168095	1	0,226485041	2,72
6	Kab Brebes	Jawa Tengah	3,2264	3	0,000512395	0,964265601	0,186580722	1,393333333
7	Kab Cilacap	Jawa Tengah	3,1103	5	0,000238826	1	0,184510128	2,136666667
8	Kab Demak	Jawa Tengah	3,5086	5	0,000394894	0,908229217	0,202277064	2,96
9	Kab Grobogan	Jawa Tengah	3,253	5	0,000281983	1	0,180523855	2,113333333
10	Kab Jepara	Jawa Tengah	3,21	5	0,000928128	1	0,172905988	2,643333333
11	Kab Karanganyar	Jawa Tengah	3,5576	5	0,000187408	1	0,126871241	2,04
12	Kab Kebumen	Jawa Tengah	3,3225	5	0,000454357	0,751886294	0,139516472	2,106666667
13	Kab Kendal	Jawa Tengah	3,1226	5	0,000311266	0,920961011	0,132649778	2,936666667
14	Kab Klaten	Jawa Tengah	3,2109	5	0,001385031	0,691850292	0,14728988	2,23
15	Kab Kudus	Jawa Tengah	3,3271	5	0,000251506	1	0,192868148	2,723333333
16	Kab Magelang	Jawa Tengah	3,1490	5	0,000822666	0,785568506	0,201777274	2,18
17	Kab Pati	Jawa Tengah	3,557	5	0,000924822	1	0,158020696	2,27
18	Kab Pekalongan	Jawa Tengah	3,311	5	0,000929923	0,554701798	0,199659416	1,493333333
19	Kab Pemasang	Jawa Tengah	3,1591	5	0,000279843	1	0,125363912	3,106666667
20	Kab Purbalingga	Jawa Tengah	3,2219	5	0,007509044	0,588249343	0,140540519	1,943333333
21	Kab Purworejo	Jawa Tengah	3,2878	5	0,001966773	0,959056945	0,172101088	2,043333333

22	Kab Rembang	Jawa Tengah	3,0606	5	0,001801663	0,92315557	0,170526776	2,35
23	Kab Semarang	Jawa Tengah	3,4004	5	0,000353524	0,928703965	0,186504962	2,663333333
24	Kab Sragen	Jawa Tengah	3,3623	5	0,001529668	1	0,191442385	2,753333333
25	Kab Sukoharjo	Jawa Tengah	3,2613	5	0,000607169	0,976570051	0,189481776	2,773333333
26	Kab Tegal	Jawa Tengah	3,2254	5	0,000234842	1	0,162284398	2,58
27	Kab Temanggung	Jawa Tengah	3,3452	5	0,000635808	0,493067152	0,111219997	1,773333333
28	Kab Wonosobo	Jawa Tengah	3,1778	5	0,000402206	0,888415834	0,205585495	2,94
29	Kota Magelang	Jawa Tengah	3,3596	5	0,003235824	0,307269302	0,253292785	2,34
30	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	3,2333	5	0,002152498	0,839421936	0,165743996	2,95
31	Kota Salatiga	Jawa Tengah	3,4381	5	0,001403634	1	0,24040367	1,66
32	Kota Semarang	Jawa Tengah	3,4395	5	0,00201001	0,556223525	0,272602821	3,266666667
33	Kota Surakarta	Jawa Tengah	3,4034	5	0,000325274	0,947242103	0,273535216	2,53
34	Kota Tegal	Jawa Tengah	3,2401	5	0,003070567	0,893611761	0,123943157	2,333333333
35	Kab Bandung	Jawa Barat	3,342	5	0,000865642	0,313313136	0,139414968	2,723333333
36	Kab Bandung Barat	Jawa Barat	3,3177	3	0,001345402	0,896917713	0,100056999	2,543333333
37	Kab Bekasi	Jawa Barat	3,3733	5	0,000574406	0,981177795	0,168776592	2,266666667
38	Kab Bogor	Jawa Barat	3,2551	5	0,001818347	0,599310557	0,179852798	2,576666667
39	Kab Ciamis	Jawa Barat	3,3365	5	0,001696955	1	0,169953394	1,443333333
40	Kab Cianjur	Jawa Barat	3,227	3	0,000719499	1	0,232094916	2,19
41	Kab Cirebon	Jawa Barat	3,2617	5	0,000555443	1	0,138782776	2,633333333
42	Kab Garut	Jawa Barat	3,5116	5	0,001956932	0,806047401	0,126277932	2,036666667
43	Kab Indramayu	Jawa Barat	3,4669	5	0,001167668	1	0,236850302	1,65
44	Kab Karawang	Jawa Barat	3,2976	5	0,000755462	0,783994103	0,161741277	2,22
45	Kab Kuningan	Jawa Barat	3,4394	5	0,000719622	0,80977563	0,088364178	2,253333333



46	Kab Pangandaran	Jawa Barat	3,3578	5	0,002796778	0,837233329	0,245253917	1,503333333
47	Kab Purwakarta	Jawa Barat	3,3672	5	0,000846241	0,756699383	0,118828484	2,996666667
48	Kab Subang	Jawa Barat	3,3859	5	0,000649863	0,425032681	0,165820152	2,033333333
49	Kab Sukabumi	Jawa Barat	3,5157	5	0,000465512	0,958416406	0,160655901	2,543333333
50	Kab Sumedang	Jawa Barat	3,2484	5	0,002348866	0,220576815	0,152541079	2,46
51	Kota Bandung	Jawa Barat	3,4013	5	0,000901425	0,717166834	0,171674702	3,113333333
52	Kota Bekasi	Jawa Barat	3,3686	5	0,002987847	0,801785573	0,155964741	2,426666667
53	Kota Bogor	Jawa Barat	3,3965	5	0,000812162	1	0,189256293	2,913333333
54	Kota Cimahi	Jawa Barat	3,4698	5	0,001113384	1	0,123202121	3,07
55	Kota Cirebon	Jawa Barat	3,2964	5	0,010405225	0,160888561	0,278610056	2,263333333
56	Kota Sukabumi	Jawa Barat	3,3809	5	0,001169437	0,576107007	0,195620163	2,33
57	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	3,3703	5	0,000562223	1	0,185363804	2,156666667
58	Kab Bantul	Yogyakarta	3,4462	5	0,000636161	1	0,15614704	1,84
59	Kab Kulon Progo	Yogyakarta	3,4666	5	0,001093667	1	0,229907137	2,686666667
60	Kab Sleman	Yogyakarta	3,5139	5	0,000840311	0,050088601	0,159417622	3,126666667
61	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	3,4581	5	0,000771115	1	0,196700709	2,956666667
62	Kab Bangkalan	Jawa Timur	3,054	5	0,006167362	0,945636207	0,155579542	1,986666667
63	Kab Banyuwangi	Jawa Timur	3,5591	5	0,001808742	1	0,174452056	3,433333333
64	Kab Blitar	Jawa Timur	3,0623	5	0,001032377	0,991849145	0,185473042	2,136666667
65	Kab Bojonegoro	Jawa Timur	3,1635	5	0,003532652	1	0,194896313	2,516666667
66	Kab Bondowoso	Jawa Timur	3,2261	5	0,002159734	1	0,141546619	1,856666667
67	Kab Gresik	Jawa Timur	3,3653	5	0,000732992	0,855255742	0,159810132	2,556666667
68	Kab Jember	Jawa Timur	3,1013	3	0,000602901	0,908537449	0,154270301	1,8
69	Kab Jombang	Jawa Timur	3,4617	5	0,001639951	0,901904577	0,124767174	1,433333333

70	Kab Kediri	Jawa Timur	3,0258	5	0,000259722	1	0,199803497	1,563333333
71	Kab Lamongan	Jawa Timur	3,4199	5	0,002237815	0,94362264	0,188996358	3,113333333
72	Kab Lumajang	Jawa Timur	3,3015	5	0,001007512	0,646697879	0,137321637	1,993333333
73	Kab Madiun	Jawa Timur	3,3308	5	0,001746839	1	0,165722247	2,1
74	Kab Magetan	Jawa Timur	3,2329	5	0,001402779	0,905857189	0,11359543	1,82
75	Kab Malang	Jawa Timur	3,4458	5	0,001814853	1	0,196912563	1,936666667
76	Kab Mojokerto	Jawa Timur	3,3637	5	0,001817064	0,688710669	0,233285006	1,74
77	Kab Nganjuk	Jawa Timur	3,2243	5	0,0047152	1	0,146914722	2,16
78	Kab Ngawi	Jawa Timur	3,2052	5	0,000462355	1	0,151727992	2,16
79	Kab Pacitan	Jawa Timur	3,2881	5	0,002141885	0,97747357	0,1703825	1,563333333
80	Kab Pamekasan	Jawa Timur	3,1629	5	0,004642353	0,947654903	0,184573407	2,31
81	Kab Pasuruan	Jawa Timur	3,4784	5	0,0001158	1	0,142645227	2,416666667
82	Kab Ponorogo	Jawa Timur	3,1249	5	0,001507212	0,933646133	0,182474149	1,663333333
83	Kab Probolinggo	Jawa Timur	3,227	5	0,001288615	1	0,111722488	2,153333333
84	Kab Sampang	Jawa Timur	3,3038	5	0,002048008	0,803271886	0,185142532	1,38
85	Kab Sidoarjo	Jawa Timur	3,4866	5	0,000926275	1	0,193519836	2,553333333
86	Kab Situbondo	Jawa Timur	3,1126	5	0,002631887	0,899855022	0,230252833	3,24
87	Kab Sumenep	Jawa Timur	3,4212	5	0,000464798	1	0,164490133	1,88
88	Kab Trenggalek	Jawa Timur	3,4623	5	0,002048454	1	0,178315785	1,763333333
89	Kab Tuban	Jawa Timur	3,3468	5	0,000959255	1	0,204661332	2,363333333
90	Kab Tulungagung	Jawa Timur	3,2292	3	0,001537807	1	0,143879769	2,463333333
91	Kota Batu	Jawa Timur	3,2745	5	0,001518206	1	0,14723184	2,43
92	Kota Blitar	Jawa Timur	3,3526	5	0,000502482	1	0,197319315	1,516666667
93	Kota Kediri	Jawa Timur	3,4197	5	0,002455848	1	0,107636164	2,84

94	Kota Madiun	Jawa Timur	3,3805	5	0,000903586	1	0,249925631	3,156666667
95	Kota Malang	Jawa Timur	3,3679	5	0,00168419	0,96701388	0,182436561	2,44
96	Kota Pasuruan	Jawa Timur	3,0649	3	0,007945759	0,814703833	0,227648687	2,383333333
97	Kota Probolinggo	Jawa Timur	3,3908	5	0,003099562	0,86326808	0,171877056	2,533333333
98	Kota Surabaya	Jawa Timur	3,376	5	0,000283351	0,950716786	0,29718503	3,613333333
99	Kab Lebak	Banten	3,2671	5	0,000797755	1	0,128238482	2,936666667
100	Kab Pandeglang	Banten	3,1538	5	0,001099622	0,12817936	0,139613766	3,256666667
101	Kab Serang	Banten	3,4201	5	0,002078786	0,628366548	0,1966975	2,333333333
102	Kab Tangerang	Banten	3,2345	5	0,000386048	1	0,299984686	3,083333333
103	Kota Cilegon	Banten	3,3452	5	0,000844301	0,151882709	0,191584865	3,229999994
104	Kota Serang	Banten	3,2345	5	0,000281195	0,824239108	0,238980271	2,406666662
105	Kota Tangerang	Banten	3,5444	5	0,00046968	0,191426325	0,16637657	3,163333333
106	Kota Tangerang Selatan	Banten	3,3932	5	0,000817151	0,989000256	0,31176735	3,29

Lampiran 4 Contoh EKPPD Tingkat Provinsi Tahun 2018

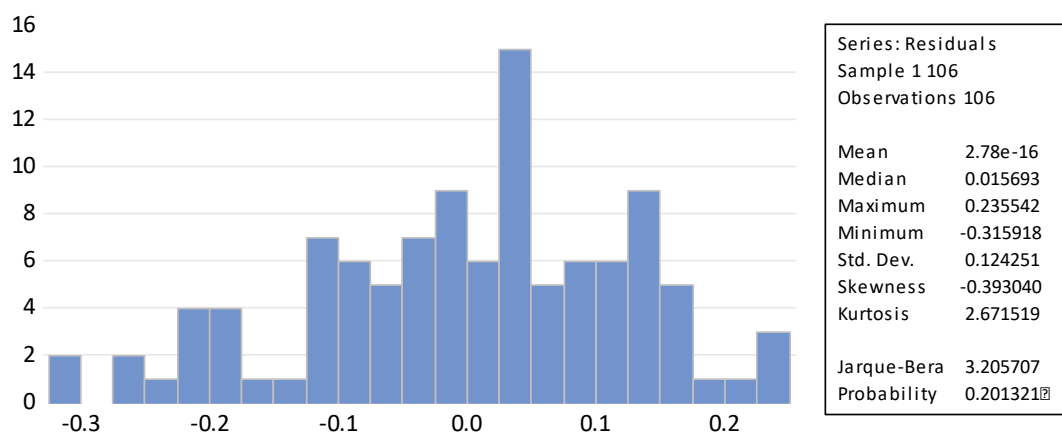
<b>No</b>	<b>Nama Pemerintahan</b>	<b>Skor</b>	<b>Prestasi</b>	<b>Tahun LPPD</b>
1	Provinsi Jawa Timur	3,4144	ST	2018
2	Provinsi Jawa Barat	3,3088	ST	2018
3	Provinsi Jawa Tengah	3,2406	ST	2018
4	Provinsi Dki Jakarta	3,2373	ST	2018
5	Provinsi Di Yogyakarta	3,2211	ST	2018
6	Provinsi Kalimantan Timur	3,0884	ST	2018
7	Provinsi Bali	3,0718	ST	2018
8	Provinsi Sulawesi Selatan	3,0595	ST	2018
9	Provinsi Kalimantan Selatan	3,0573	ST	2018
10	Provinsi Banten	3,0513	ST	2018
11	Provinsi Kepulauan Riau	3,0221	ST	2018
12	Provinsi Sumatera Barat	3,0155	ST	2018
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,9999	T	2018
14	Provinsi Kalimantan Tengah	2,9601	T	2018
15	Provinsi Bengkulu	2,9581	T	2018
16	Provinsi Bangka Belitung	2,9573	T	2018
17	Provinsi Gorontalo	2,9343	T	2018
18	Provinsi Riau	2,9178	T	2018
19	Provinsi Sulawesi Utara	2,8634	T	2018
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,8524	T	2018
21	Provinsi Jambi	2,8491	T	2018
22	Provinsi Sumatera Selatan	2,8427	T	2018
23	Provinsi Sulawesi Tengah	2,7821	T	2018
24	Provinsi Kalimantan Utara	2,7808	T	2018
25	Provinsi Aceh	2,7785	T	2018
26	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,7692	T	2018
27	Provinsi Sulawesi Barat	2,7661	T	2018
28	Provinsi Sumatera Utara	2,7522	T	2018
29	Provinsi Kalimantan Barat	2,7367	T	2018
30	Provinsi Lampung	2,7122	T	2018
31	Provinsi Maluku	2,6295	T	2018
32	Provinsi Maluku Utara	2,5661	T	2018
33	Provinsi Papua Barat	2,5004	T	2018
34	Provinsi Papua	2,4919	T	2018

## Lampiran 5 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	3.316233	4.886792	0.001491	0.846658	0.178777	2.390660
Median	3.333650	5.000000	0.000942	0.955457	0.172504	2.356667
Maximum	3.559100	5.000000	0.010405	1.000000	0.311767	3.613333
Minimum	3.009400	3.000000	0.000116	0.050089	0.088364	1.380000
Std. Dev.	0.131456	0.464363	0.001616	0.235914	0.045404	0.533671
Skewness	-0.279425	-3.837534	3.045420	-1.840665	0.637963	0.086810
Kurtosis	2.404259	15.72667	14.32497	5.509795	3.375389	2.266896
Jarque-Bera	2.946887	975.5300	730.3107	87.67644	7.812656	2.506838
Probability	0.229135	0.000000	0.000000	0.000000	0.020114	0.285527
Sum	351.5207	518.0000	0.158055	89.74575	18.95037	253.4100
Sum Sq. Dev.	1.814460	22.64151	0.000274	5.843835	0.216461	29.90452
Observations	106	106	106	106	106	106

## Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas



## 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.026081	170.5419	NA
X1	0.000739	116.4031	1.031927
X2	65.87225	2.071650	1.113969
X3	0.003030	15.29571	1.092362
X4	0.076688	17.05157	1.024041
X5	0.000577	22.63120	1.064578

## 3. Hasil Uji Heterokestisitas

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.247431	Prob. F(19,86)	0.2408
Obs*R-squared	22.90154	Prob. Chi-Square(19)	0.2417
Scaled explained SS	17.03469	Prob. Chi-Square(19)	0.5875

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/27/22 Time: 09:13

Sample: 1 106

Included observations: 106

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205368	0.339187	0.605470	0.5465
X1^2	-0.006316	0.013181	-0.479212	0.6330
X1*X2	2.785627	4.533962	0.614391	0.5406
X1*X3	0.096651	0.133290	0.725117	0.4703
X1*X4	-0.051213	0.147572	-0.347035	0.7294
X1*X5	-0.013346	0.015401	-0.866550	0.3886
X2^2	939.3145	798.4548	1.176415	0.2427
X2*X3	3.081103	9.365243	0.328993	0.7430
X2*X4	-33.01335	41.36644	-0.798071	0.4270
X2*X5	8.909183	5.253912	1.695724	0.0936
X2	-37.44420	32.84099	-1.140167	0.2574
X3^2	0.035493	0.044728	0.793543	0.4296
X3*X4	-0.213845	0.264029	-0.809928	0.4202
X3*X5	0.003106	0.020532	0.151289	0.8801
X3	-0.491744	0.679687	-0.723486	0.4713
X4^2	0.260312	0.845639	0.307828	0.7590
X4*X5	-0.187974	0.082452	-2.279802	0.0251
X4	0.778142	0.841283	0.924946	0.3576
X5^2	0.017693	0.007068	2.503176	0.0142
X5	0.004964	0.077016	0.064457	0.9488

R-squared	0.216052	Mean dependent var	0.015293
Adjusted R-squared	0.042855	S.D. dependent var	0.019865
S.E. of regression	0.019435	Akaike info criterion	-4.875201
Sum squared resid	0.032484	Schwarz criterion	-4.372665
Log likelihood	278.3857	Hannan-Quinn criter.	-4.671521
F-statistic	1.247431	Durbin-Watson stat	1.962065
Prob(F-statistic)	0.240787		

## 4. Hasil Uji Autokorelasi

Sebelum perbaikan dengan metode *Cochrane-Orcutt*

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

Setelah perbaikan dengan metode *Cochrane-Orcutt*

R-squared	0.163522	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.103773	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.124448	Akaike info criterion	-1.256678
Sum squared resid	1.517757	Schwarz criterion	-1.055664
Log likelihood	74.60394	Hannan-Quinn criter.	-1.175206
F-statistic	2.736832	Durbin-Watson stat	1.908106
Prob(F-statistic)	0.012268		

## Lampiran 7 Hasil Uji Ketepatan Model

## 1. Hasil Uji F

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

2. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

## Lampiran 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.040640	0.161495	18.82812	0.0000
X1	0.054718	0.027181	2.013071	0.0468
X2	-18.00711	8.116172	-2.218671	0.0288
X3	-0.036433	0.055047	-0.661856	0.5096
X4	0.192058	0.276926	0.693534	0.4896
X5	0.013202	0.024022	0.549560	0.5838

R-squared	0.106606	Mean dependent var	3.316233
Adjusted R-squared	0.061936	S.D. dependent var	0.131456
S.E. of regression	0.127320	Akaike info criterion	-1.229293
Sum squared resid	1.621029	Schwarz criterion	-1.078533
Log likelihood	71.15255	Hannan-Quinn criter.	-1.168189
F-statistic	2.386530	Durbin-Watson stat	2.437379
Prob(F-statistic)	0.043334		

## Lampiran 9 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.040640	0.161495	18.82812	0.0000
X1	0.054718	0.027181	2.013071	0.0468
X2	-18.00711	8.116172	-2.218671	0.0288
X3	-0.036433	0.055047	-0.661856	0.5096
X4	0.192058	0.276926	0.693534	0.4896
X5	0.013202	0.024022	0.549560	0.5838



## Lampiran 10 Hasil Cek Plagiarisme

Skripsi Susan			
ORIGINALITY REPORT			
18%	19%	14%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		7%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper		2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source		1%
4	jurnal.unswagati.ac.id Internet Source		1%
5	poltekanika.ac.id Internet Source		1%
6	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper		1%
7	adoc.pub Internet Source		1%
8	core.ac.uk Internet Source		1%
9	jurnal.usbypkp.ac.id Internet Source		1%

## Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## A. Data Pribadi

1. Nama : Susan Azis
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 02 Oktober 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Bulurejo RT 14/RW -, Ngrombo,  
Plupuh, Sragen
5. Agama : Islam
6. Nomor Telepon : 082142017285
7. Email : [susanazis28@gmail.com](mailto:susanazis28@gmail.com)

## B. Riwayat Pendidikan

<b>Periode (Tahun)</b>	<b>Sekolah/Institusi /Universitas</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>
2004 - 2006	RA Perwanida	-	TK
2006 - 2012	MI Al Ikhsan Ngrombo	-	Sekolah Dasar
2012 - 2015	MTsN 4 Sragen	-	SLTP
2015 - 2018	MAN 2 Sragen	IPS	SLTA
2018 - Sekarang	UIN Raden Mas Said Surakarta	Akuntansi Syariah	Perguruan Tinggi